

Pengaruh Akuntabilitas, *Value For Money*, dan Transparansi Anggaran Terhadap Pengelolaan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Palembang

Wahyuningsih¹, Sopiyan AR², Yevi Dwitayanti³

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

nyuni723@gmail.com, sopiyan@polsri.ac.id, yevi_dwitayanti@polsri.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of accountability, value for money, and budget transparency on financial management in Regional Apparatus Organizations (OPD) of Palembang City. The study was conducted in 32 OPD involving 96 respondents consisting of treasurers, heads of financial sub-divisions, and financial staff directly involved in regional financial management. Primary data were collected through questionnaires using a purposive sampling technique. Data analysis was carried out using descriptive statistics, data quality tests including validity and reliability tests, classical assumption tests consisting of normality, multicollinearity, and heteroscedasticity tests, as well as multiple linear regression analysis. Hypothesis testing was conducted through the coefficient of determination (R^2), partial test (t -test), and simultaneous test (F -test) using SPSS version 26. The results indicate that accountability, value for money, and budget transparency have a positive and significant effect on financial management individually. Simultaneously, these three variables also have a positive and significant effect on financial management in OPDs of Palembang City. These findings suggest that strengthening accountability, implementing value for money principles, and enhancing budget transparency can improve the effectiveness, efficiency, and accountability of regional financial management.

Keywords : Accountability, Value for Money, Budget Transparency, Financial Management.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas, *value for money*, dan transparansi anggaran terhadap pengelolaan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Palembang. Penelitian dilakukan pada 32 OPD dengan responden sebanyak 96 orang yang terdiri atas bendahara, kepala sub bagian keuangan, dan staf keuangan yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan daerah. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif, uji kualitas data yang meliputi uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, serta analisis regresi linear berganda. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji koefisien determinasi (R^2), uji parsial (uji t), dan uji simultan (uji F) dengan bantuan program SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial akuntabilitas, *value for money*, dan transparansi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada OPD di Kota Palembang. Secara simultan, ketiga variabel tersebut juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan akuntabilitas, penerapan prinsip

value for money, dan transparansi anggaran dapat mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Value for Money, Transparansi Anggaran, Pengelolaan Keuangan.

PENDAHULUAN

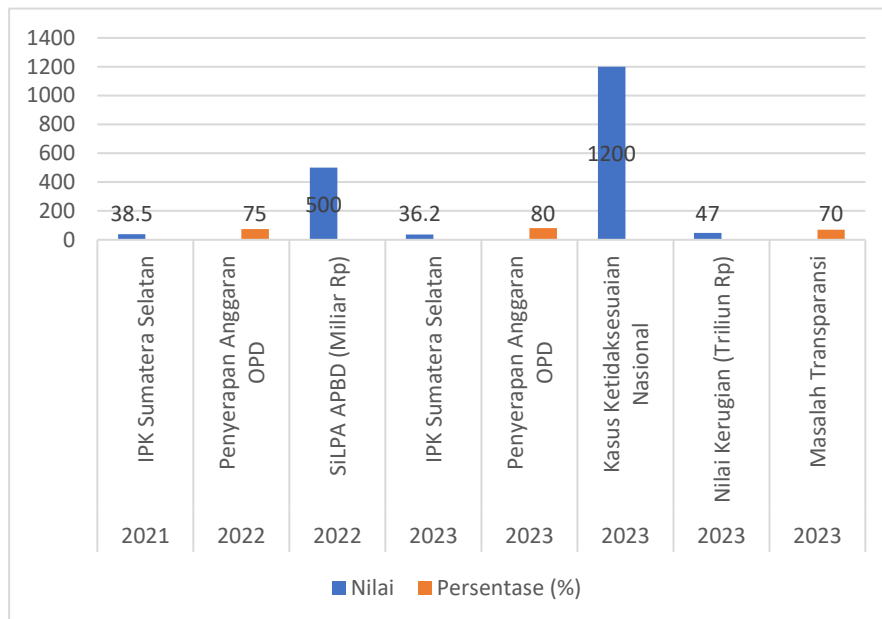
Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Selain itu, dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 ditegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara profesional dan akuntabel untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pengelolaan keuangan daerah juga diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 19 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Selanjutnya, pedoman teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah diatur PP Nomor 77 Tahun 2020. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki peran penting sebagai pelaksana program dan kegiatan pemerintah daerah. OPD bertanggung jawab dalam mengelola anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, setiap OPD dituntut untuk mampu mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan efisien agar dapat mencapai tujuan pembangunan daerah secara optimal.

Berdasarkan hasil Badan pemeriksaan keuangan Tahun 2023, ditemukan sekitar 1.200 kasus ketidaksesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan nilai mencapai Rp47 triliun, dimana sekitar 70% di antaranya berkaitan dengan lemahnya transparansi dan belum optimalnya penerapan prinsip *value for money* (Keuangan, 2023). Pada tingkat regional, khususnya di Sumatera Selatan, LHP BPK tahun 2022–2023 menunjukkan bahwa terdapat sedikitnya 15 OPD di Kota Palembang, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan, yang masih memiliki temuan terkait inefisiensi anggaran, termasuk praktik *mark-up* proyek serta tingginya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang mencapai sekitar Rp500 miliar pada APBD tahun 2022.

Selain itu, kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada periode 2021–2023, seperti dalam pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Palembang, semakin menegaskan lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini berdampak pada menurunnya kepercayaan publik yang tercermin dari penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Sumatera Selatan dari 38,5 pada tahun 2021 menjadi 36,2 pada tahun 2023 menurut (International, 2023). Dengan posisi Kota Palembang sebagai ibu kota provinsi dan

pusat ekonomi regional dengan APBD mencapai Rp4,5 triliun pada tahun 2023, kondisi pengelolaan keuangan yang belum optimal tersebut berpotensi menghambat pembangunan daerah yang berkelanjutan, sehingga menjadikan penelitian ini penting untuk dilakukan dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada efisiensi sesuai dengan agenda RPJMN 2020–2024. Disajikan pada gambar 1.1.



Sumber: BPK (Data diolah, 2026)

Gambar 1.1

Grafik Pengelolaan Keuangan 2021 – 2023

Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagai pihak pengelola keuangan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat sebagai pemegang kepentingan. Dalam perspektif teori keagenan, pemerintah bertindak sebagai agen yang harus memberikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai prinsipal. Tingkat akuntabilitas yang tinggi akan mendorong pengelolaan keuangan yang lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Mardiasmo, 2018). Dengan adanya akuntabilitas yang baik, setiap proses pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, dapat dilakukan secara lebih bertanggung jawab sehingga meminimalisir terjadinya penyimpangan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah, dimana semakin tinggi tingkat akuntabilitas, maka semakin baik pula pengelolaan keuangan yang dihasilkan (Trimarstuti, 2019).

Value for money merupakan konsep dalam pengelolaan keuangan sektor publik yang menekankan pada penggunaan anggaran secara ekonomis, efisien, dan

efektif. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap sumber daya yang digunakan mampu menghasilkan *output* dan *outcome* yang optimal (Mardiasmo, 2018). Dalam pengelolaan keuangan daerah, *value for money* menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan penggunaan anggaran, tidak hanya dari sisi penyerapan anggaran, tetapi juga dari hasil yang dicapai. Apabila prinsip *value for money* diterapkan dengan baik, maka pengelolaan keuangan akan lebih efisien dan tepat sasaran, sehingga dapat meningkatkan kinerja program pemerintah daerah. Sebaliknya, jika prinsip ini tidak diterapkan secara optimal, maka akan berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran dan rendahnya efektivitas program. Oleh karena itu, *value for money* memiliki hubungan yang positif terhadap pengelolaan keuangan daerah (Haliah et al., 2024).

Transparansi anggaran merupakan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi terkait pengelolaan keuangan kepada masyarakat secara jujur, lengkap, dan mudah diakses. Transparansi menjadi salah satu prinsip utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, karena memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran (Krina, 2003). Dengan adanya transparansi yang tinggi, pemerintah daerah akan terdorong untuk mengelola keuangan secara lebih hati-hati dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, transparansi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa transparansi anggaran berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah, dimana semakin tinggi tingkat transparansi, maka semakin baik kualitas pengelolaan keuangan yang dihasilkan (Pradiani et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2023), penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang dilakukan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme dan digunakan untuk mengkaji populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif dilakukan melalui penggunaan instrumen penelitian, sedangkan analisis data dilakukan secara statistik atau kuantitatif dengan tujuan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menjelaskan hubungan antarvariabel secara objektif berdasarkan data empiris yang diperoleh selama proses penelitian.

Menurut (Sugiyono, 2023) menyatakan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di Kota Palembang. OPD dipilih sebagai populasi penelitian karena memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah serta sebagai pelaksana kebijakan publik di tingkat pemerintah daerah. tersaji pada tabel 3.2.

Tabel 3.1
Populasi Penelitian

No.	Nama Organisasi Perangkat Daerah
1.	Sekretariat Daerah Kota Palembang
2.	Sekretariat DPRD Kota Palembang
3.	Inspektorat Kota Palembang
4.	Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
5.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
6.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda Litbang)
7.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM)
8.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL)
9.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
11.	Dinas Kesehatan
12.	Dinas Sosial
13.	Dinas Tenaga Kerja
14.	Dinas Pariwisata
15.	Dinas Kebudayaan
16.	Dinas Lingkungan Hidup
17.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
18.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
19.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pertanahan (PRKPP)
20.	Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
21.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)
22.	Dinas Perdagangan
23.	Dinas Perindustrian
24.	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP)
25.	Dinas Pendidikan
26.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora)
27.	Dinas Perhubungan (Dishub)
28.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
29.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPPA-PM)
30.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
31.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
32.	Dinas Perikanan

Sumber : Website resmi pemerintah kota Palembang(<https://palembang.go.id/>)

Sampel

Menurut (Sugiyono, 2023) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Palembang, Berdasarkan kriteria Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada bagian keuangan di OPD Kota Palembang, yaitu Bendahara, Kepala Sub Bagian Keuangan, dan Staf Keuangan (Bastian, 2019). Untuk memperoleh data yang representatif, setiap OPD diambil sebanyak 3 orang responden pada 32 OPD Kota Palembang, dengan total keseluruhan sebanyak $32 \times 3 = 96$ sampel.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab, sehingga peneliti dapat memperoleh data yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2023).

Uji Kualitas Data

Uji kualitas data dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data sudah layak dan dapat dipercaya. Uji kualitas data dalam penelitian ini meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Menurut (Ghozali, 2021) pengujian kualitas data bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dari kuesioner dapat digunakan dalam analisis lebih lanjut.

Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi *Pearson Product Moment*, yaitu dengan mengkorelasikan skor setiap item pertanyaan dengan skor total variabel. Pengujian validitas dilakukan dengan bantuan program *SPSS versi 26 for Windows*. Validitas tiap-tiap pertanyaan pada kuesioner yang disebar dapat dilihat pada tabel 3.3 sampai dengan tabel 3.6.

Tabel 3.2

Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas (X1)

Item Pernyataan	R hitung	R tabel (df=96-2)	Keterangan
X1.1	0,584	0,200	Valid
X1.2	0,500	0,200	Valid
X1.3	0,586	0,200	Valid
X1.4	0,522	0,200	Valid
X1.5	0,611	0,200	Valid
X1.6	0,490	0,200	Valid

Item Pernyataan	R hitung	R tabel (df=96-2)	Keterangan
X1.7	0,572	0,200	Valid
X1.8	0,484	0,200	Valid
X1.9	0,680	0,200	Valid

Sumber: Data diolah (2026)

Hasil uji validitas terhadap variabel Akuntabilitas (X1) diperoleh dengan membandingkan nilai rhitung dengan rtabel. Terdapat 9 item pernyataan yang diajukan peneliti kepada responden, seluruh pernyataan dinyatakan valid karena semua rhitung > rtabel yaitu 0,200.

Tabel 3.3

Hasil Uji Validitas Variabel Value For Money (X2)

Item Pernyataan	R hitung	R tabel (df=96-2)	Keterangan
X2.1	0,677	0,200	Valid
X2.2	0,726	0,200	Valid
X2.3	0,738	0,200	Valid
X2.4	0,639	0,200	Valid
X2.5	0,695	0,200	Valid
X2.6	0,686	0,200	Valid
X2.7	0,761	0,200	Valid
X2.8	0,671	0,200	Valid
X2.9	0,731	0,200	Valid

Sumber: Data diolah (2026)

Hasil uji validitas terhadap variabel *Value For Money* (X2) di yang diperoleh dengan membandingkan nilai rhitung dengan rtabel. Berdasarkan hasil SPSS diketahui bahwa seluruh item pernyataan dinyatakan valid.

Tabel 3.4

Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi Anggaran (X3)

Item Pernyataan	R hitung	R tabel (df=96-2)	Keterangan
X3.1	0,569	0,200	Valid
X3.2	0,686	0,200	Valid
X3.3	0,796	0,200	Valid
X3.4	0,482	0,200	Valid
X3.5	0,475	0,200	Valid
X3.6	0,544	0,200	Valid
X3.7	0,653	0,200	Valid
X3.8	0,697	0,200	Valid

Sumber: Data diolah (2026)

Hasil uji validitas terhadap variabel Transparansi Anggaran (X3) di yang diperoleh dengan membandingkan nilai rhitung dengan rtabel. Berdasarkan hasil SPSS diketahui bahwa seluruh item pernyataan dinyatakan valid.

Tabel 3.5

Hasil Uji Validitas Variabel Pengelolaan Keuangan (Y)

Item Pernyataan	R hitung	R tabel (df=96-2)	Keterangan
Y.1	0,605	0,200	Valid
Y.2	0,734	0,200	Valid
Y.3	0,629	0,200	Valid
Y.4	0,686	0,200	Valid
Y.5	0,624	0,200	Valid
Y.6	0,727	0,200	Valid
Y.7	0,772	0,200	Valid
Y.8	0,742	0,200	Valid
Y.9	0,679	0,200	Valid

Sumber: Data diolah (2026)

Hasil uji validitas terhadap variabel Pengelolaan Keuangan (Y) di yang diperoleh dengan membandingkan nilai rhitung dengan rtabel. Berdasarkan hasil SPSS diketahui bahwa seluruh item pernyataan dinyatakan valid.

Uji Reabilitas

Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan metode *Cronbach's Alpha* dengan bantuan program *SPSS* versi 26 for Windows. Nilai Realibilitas dalam penelitian ini tersaji pada tabel 3.7.

Tabel 3.6

Hasil Uji Realibilitas

No	Variabel	<i>Cronbach's Alpha (a)</i>	Koefisien Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Akuntabilitas (X1)	0,723	0,6	Reliabel
2	<i>Value For Money</i> (X2)	0,871	0,6	Reliabel
3	Transparansi Anggaran (X3)	0,769	0,6	Reliabel
4	Pengelolaan Keuangan (Y)	0,860	0,6	Reliabel

Sumber: Data diolah (2026)

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas instrumen Akuntabilitas, *Value For Money*, Transparansi Anggaran, dan Pengelolaan Keuangan antara lain 0,723 0,871, 0,769, dan 0,860. Dari semua nilai variabel tersebut menunjukkan bahwa koefisien *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan lolos dalam uji realibilitas.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian memenuhi asumsi-asumsi dasar sehingga hasil analisis dapat dipercaya dan tidak bias. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, dengan bantuan program SPSS versi 26 for Windows.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2018:31) statistik deskriptif memberikan sebuah gambaran atau deskripsi dari suatu data yang telah terkumpul dan dapat dilihat dari nilai minimum, maximum, mean, dan standar deviation. Statistik deskriptif penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.7

Tabel 4.1
Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas	96	32,00	45,00	37,9063	3,30256
Value_For_Money	96	31,00	45,00	39,1146	3,33678
Transparansi_Anggaran	96	29,00	40,00	34,0208	2,85428
Pengelolaan_Kuangan	96	34,00	45,00	39,6667	3,16450
Valid N (listwise)	96				

Sumber: Output pengolahan data dari SPSS,2026

Berdasarkan pengujian statistik deskriptif yang disajikan dalam Tabel 4.7, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas (X_1)

Akuntabilitas memiliki nilai minimum sebesar 32,00, nilai maksimum sebesar 45,00, dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 37,9063 dengan standar deviasi sebesar 3,30256. Nilai rata-rata dan nilai standar deviasi pada variabel akuntabilitas menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar daripada standar deviasinya.

2. Value for Money (X_2)

Value for Money memiliki nilai minimum sebesar 31,00, nilai maksimum sebesar 45,00, dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 39,1146 dengan standar deviasi sebesar 3,33678. Nilai rata-rata dan nilai standar deviasi pada variabel Value for Money menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar daripada standar deviasinya.

3. Transparansi Anggaran (X_3)

Transparansi Anggaran memiliki nilai minimum sebesar 29,00, nilai maksimum sebesar 40,00, dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 34,0208 dengan standar deviasi sebesar 2,85428. Nilai rata-rata dan nilai standar deviasi pada variabel

Transparansi Anggaran menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar daripada standar deviasinya.

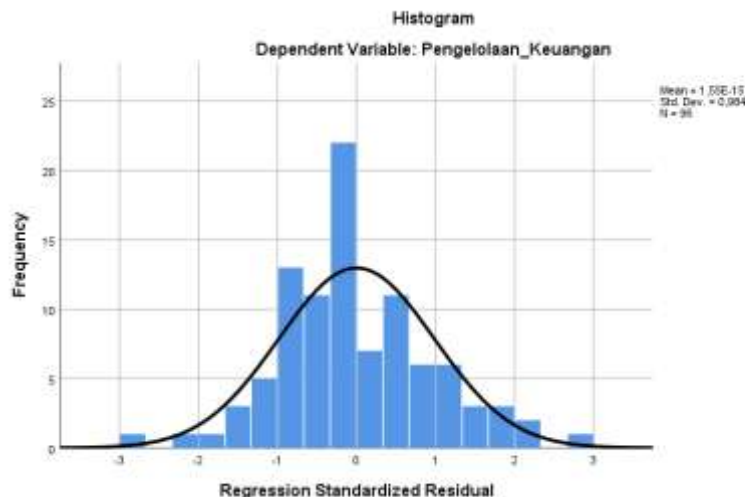
4. Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki nilai minimum sebesar 34,00, nilai maksimum sebesar 45,00, dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 39,6667 dengan standar deviasi sebesar 3,16450. Nilai rata-rata dan nilai standar deviasi pada variabel Pengelolaan Keuangan Daerah menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar daripada standar deviasinya.

Anallisis Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Data dapat dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai Asymp Sig (2 tailed) hasil perhitungan kolmogorov-smirnov $> 0,05$. Berikut ini merupakan hasil uji normalitas histogram tersaji dalam gambar 4.1



Sumber: Output pengolahan data dari SPSS,2026

Gambar 4.1

Hasil Uji Histogram

Pada Gambar 4.1 terlihat bahwa pola distribusi data membentuk kurva menyerupai lonceng dan tidak mengalami kecondongan ke kanan maupun ke kiri. Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian terdistribusi secara normal, sehingga asumsi normalitas dapat dinyatakan terpenuhi.

Berikut ini merupakan hasil uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* tersaji dalam tabel 4.10.

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,05659320
Most Extreme Differences	Absolute	,089
	Positive	,089
	Negative	-,049
Test Statistic		,089
Asymp. Sig. (2-tailed)		,057

a. Test distribution is Normal.

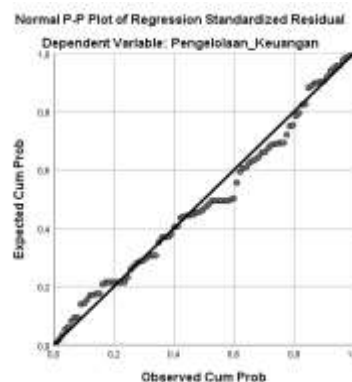
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Output pengolahan data dari SPSS,2026

Berdasarkan tabel 4.10 di atas tersebut dapat dilihat bahwa nilai signifikansi Residual (Asymp. Sig. 2-tailed) yang diperoleh dari hasil perhitungan *Kolmogorov-Smirnov* adalah 0,057 yang berarti signifikansi $> 0,05$ ($0,057 > 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual yang dihasilkan berdistribusi normal dan data yang tersedia dapat digunakan dalam statistik.

Berikut ini merupakan hasil uji normal *P-P plot* tersaji dalam gambar 4.2



Sumber: Output pengolahan data dari SPSS,2026

Gambar 4.2

Diagram Normal P-plot of regression standarized residual

Berdasarkan gambar 4.2 diketahui bahwa titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti arah garis diagonal maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual tersebut dapat dikatakan berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinieritas

Apabila nilai Tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Dari data yang di olah, maka Hasil pengujian multikolinearitas dari *output* SPSS dilihat pada tabel 4.11

Tabel 4.3

Tabel Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8,857	3,254		2,722	,008		
	Akuntabilitas	,323	,094	,337	3,422	,001	,563	1,776
	Value_For_Money	,189	,093	,200	2,028	,045	,563	1,777
	Transparansi_Anggaran	,328	,104	,296	3,161	,002	,623	1,606

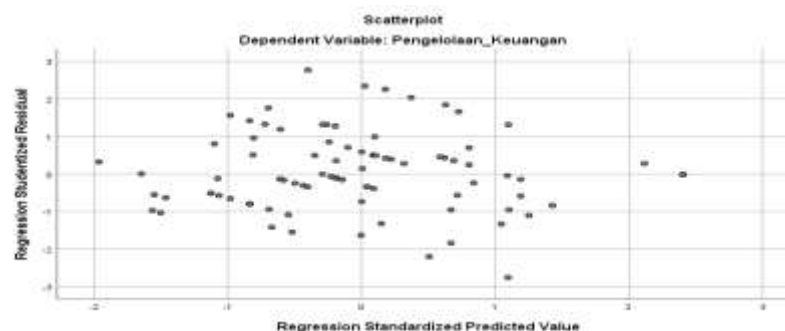
a. Dependent Variable: Pengelolaan_Kuangan

Sumber: Output pengolahan data dari SPSS,2026

Berdasarkan Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinearitas, diketahui bahwa variabel Akuntabilitas memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,563 dan nilai VIF sebesar 1,776. Variabel *Value for Money* memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,563 dan nilai VIF sebesar 1,777. Sementara itu, variabel Transparansi Anggaran memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,623 dan nilai VIF sebesar 1,606. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi yang digunakan.

Hasil Uji Heterokedasitas

Pada penelitian ini, pengujian heteroskedastisitas dilakukan menggunakan grafik *Scatterplot*. Kriteria yang digunakan adalah tidak adanya pola tertentu yang terbentuk oleh titik-titik pada grafik. Selain itu, titik-titik harus menyebar secara acak baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas. Adapun hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan grafik *Scatterplot* disajikan pada Gambar 4.3 berikut.



Sumber: Output pengolahan data dari SPSS,2026

Gambar 4.3

Hasil Uji Heteroskedasitas dengan metode grafik Scatterplot

Berdasarkan Gambar 4.3, terlihat bahwa titik-titik pada grafik *Scatterplot* menyebar secara acak dan merata, baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, serta tidak membentuk pola tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Berdasarkan uji gleser yang dilakukan, hasil uji heterokedasitas dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut :

Tabel 4.12

Tabel Hasil Uji Heterokedasitas

		Unstandardized		Standardized	t	Sig.
		Coefficients		Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,208	2,045		2,058	,042
	Akuntabilitas	,041	,059	,095	,693	,490
	Value_For_Money	-,044	,059	-,104	-,756	,452
	Transparansi_Anggaran	-,068	,065	-,136	-1,041	,300

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber: Output pengolahan data dari SPSS,2026

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, nilai absolut residual (ABS_RES). Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan nilai 0,05 disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas pada model regresi.

Anallisis Hasil Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan terdiri atas akuntabilitas, *value for money*, dan transparansi anggaran, sedangkan variabel dependennya adalah pengelolaan keuangan. Hasil pengujian regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.12 berikut.

Tabel 4.4

Hasil Regresi Linear Berganda

		Unstandardized		Standardize	t	Sig.
		Coefficients		d Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,857	3,254		2,722	,008

Akuntabilitas	,323	,094	,337	3,422	,001
Value_For_Money	,189	,093	,200	2,028	,045
Transparansi_Anggaran	,328	,104	,296	3,161	,002

a. Dependent Variable: Pengelolaan_Kuangan

Sumber: Output pengolahan data dari SPSS,2026

Berdasarkan tabel 4.12, menurut Priyatno (2018:62) pada kolom *unstandardized coefficients* bagian B diperoleh model persamaan regresi berganda yaitu:

$$Y = 8,857 + 0,323X_1 + 0,189X_2 + 0,328X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda yang diperoleh, yaitu:

1. Nilai konstanta sebesar 8,857 menunjukkan bahwa apabila variabel Akuntabilitas, *Value for Money*, dan Transparansi Anggaran dianggap konstan, Dengan demikian, apabila Akuntabilitas, *Value for Money*, dan Transparansi Anggaran meningkat sebesar 100%, maka nilai Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 8,857%. Namun, dalam analisis regresi konstanta umumnya tidak diinterpretasikan dalam bentuk persentase, melainkan sebagai nilai dasar variabel dependen.
2. Koefisien regresi variabel Akuntabilitas sebesar 0,323. Nilai positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara Akuntabilitas dengan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian, apabila Akuntabilitas meningkat sebesar 100%, maka Pengelolaan Keuangan Daerah diperkirakan meningkat sebesar 32,3%, dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Koefisien regresi variabel *Value for Money* sebesar 0,189. Nilai positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara *Value for Money* dengan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian, apabila Value for Money meningkat sebesar 100%, maka Pengelolaan Keuangan Daerah diperkirakan meningkat sebesar 18,9%, dengan asumsi variabel lain tetap.
4. Koefisien regresi variabel Transparansi Anggaran sebesar 0,328. Nilai positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara Transparansi Anggaran dengan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian, apabila Transparansi Anggaran meningkat sebesar 100%, maka Pengelolaan Keuangan Daerah diperkirakan meningkat sebesar 32,8%, dengan asumsi variabel lain tetap.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dalam penelitian ini, koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel Akuntabilitas (X_1), *Value for Money* (X_2), dan Transparansi Anggaran (X_3) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Y). Hasil pengujian koefisien determinasi (R^2) diperoleh dari *output Model Summary* dan disajikan pada Tabel 4.13 berikut.

Tabel 4.5
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,706 ^a	,498	,482	2,27858

a. Predictors: (Constant), Transparansi_Anggaran, Akuntabilitas, Value_For_Money

b. Dependent Variable: Pengelolaan_Kuangan

Sumber: *Output pengolahan data dari SPSS, 2026*

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diketahui nilai Adjusted R Square sebesar 0,482. Demikian besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel Akuntabilitas, *Value for Money*, dan Transparansi Anggaran adalah sebesar 48,2%. Sisanya sebesar 51,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil uji koefisien determinasi yang terlihat pada Tabel 4.13 juga menunjukkan bahwa nilai R sebesar 0,706. Hal ini berarti terdapat hubungan yang positif antara variabel Akuntabilitas (X_1), *Value for Money* (X_2), dan Transparansi Anggaran (X_3) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Y).

Hasil Uji t (Parsial)

Penerimaan hipotesis juga dapat dilakukan dengan cara lain seperti jika nilai signifikan $< 0,05$ maka hipotesis dapat diterima. Hasil uji t dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.14.

Tabel 4.6
Hasil Uji Parsial (Uji-t)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,857	3,254		2,722	,008
	Akuntabilitas	,323	,094	,337	3,422	,001

Value_For_Money	,189	,093	,200	2,028	,045
Transparansi_Anggaran	,328	,104	,296	3,161	,002

a. Dependent Variable: Pengelolaan_Keuangan

Sumber: Output pengolahan data dari SPSS,2026

Akuntabilitas (X1) memiliki nilai thitung sebesar 3,422. Hasil yang diperoleh untuk ttabel sebesar 1,98609. Dikarenakan thitung > ttabel ($3,422 > 1,98609$), maka dapat diketahui bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas (X1) memiliki pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan (Y).

Value For Money (X2) memiliki nilai thitung sebesar 2,028. Hasil yang diperoleh untuk ttabel sebesar 1,98609. Dikarenakan thitung > ttabel ($2,028 > 1,98609$), maka dapat diketahui bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Value For Money (X2) memiliki pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan (Y).

Transparansi Anggaran (X3) memiliki nilai thitung sebesar 3,161. Hasil yang diperoleh untuk ttabel sebesar 1,98609. Dikarenakan thitung > ttabel ($3,161 > 1,98609$), maka dapat diketahui bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Transparansi Anggaran (X3) memiliki pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan (Y).

Hasil Uji F (Simultan)

Dalam uji F ini melibatkan variabel independen yaitu Akuntabilitas (X_1), Value for Money (X_2), dan Transparansi Anggaran (X_3). Adapun ketentuan yang telah ditetapkan dalam pengujian simultan ini yaitu hipotesis dapat diterima atau dengan kata lain seluruh variabel independen secara bersama-sama memengaruhi variabel dependen apabila nilai Fhitung > Ftabel. Nilai Ftabel diperoleh dari $df_1 = k = 3$ dan $df_2 = n - k - 1 = 96 - 3 - 1 = 92$, yaitu sebesar 2,70. Hasil uji F pada keseluruhan variabel tersaji pada Tabel 4.15

Tabel 4.7
Hasil Uji Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	473,678	3	157,893	30,411	,000 ^b
	Residual	477,656	92	5,192		
	Total	951,333	95			

a. Dependent Variable: Pengelolaan_Keuangan

b. Predictors: (Constant), Transparansi_Anggaran, Akuntabilitas, Value_For_Money

Sumber: Output pengolahan data dari SPSS,2026

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Fhitung sebesar 30,411 dan nilai signifikansinya $0,000 < 0,05$, sedangkan nilai Ftabel diketahui sebesar 2,70.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, sehingga dinyatakan bahwa secara simultan variabel independen seperti yaitu Akuntabilitas (X_1), *Value for Money* (X_2), dan Transparansi Anggaran (X_3) secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen yaitu Pengelolaan Keuangan (Y). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas, Value For Money, dan Transparansi Anggaran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan (Y).

Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel Akuntabilitas adalah sebesar 3,422, sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,986. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} sehingga hipotesis yang diajukan yaitu H_0 ditolak dan H_1 diterima. Nilai signifikansi variabel Akuntabilitas yang diperoleh dalam penelitian ini sebesar 0,001, yang berarti lebih kecil dari 0,05 sehingga pengaruh yang dihasilkan signifikan. Selain itu, berdasarkan hasil koefisien regresi yang bernilai positif, maka pengaruh yang dihasilkan juga positif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Keagenan (*Agency Theory*) yang dikemukakan oleh (Mardiasmo, 2018) yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebagai *agent* memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan keuangan daerah kepada masyarakat sebagai *principal*. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas yang diterapkan, maka semakin baik pula kualitas pengelolaan keuangan yang dihasilkan karena setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Trimarstuti, 2019) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wonar et al., 2023) yang menemukan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan karena lemahnya implementasi akuntabilitas dalam praktik pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pada OPD Kota Palembang. Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil jawaban responden yang sebagian besar memberikan jawaban setuju pada indikator mengenai pertanggungjawaban penggunaan anggaran, penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu, serta pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik akuntabilitas yang diterapkan oleh OPD Kota Palembang, maka semakin baik pula pengelolaan keuangan yang dihasilkan.

Value For Money berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel *Value for Money* adalah sebesar 2,028, sedangkan nilai t_{tabel} sebesar

1,986. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai thitung lebih besar daripada ttabel sehingga H_0 ditolak dan H_2 diterima. Nilai signifikansi variabel *Value for Money* yang diperoleh dalam penelitian ini sebesar 0,045, yang berarti lebih kecil dari 0,05 sehingga pengaruh yang dihasilkan signifikan. Berdasarkan hasil koefisien regresi yang bernilai positif, maka pengaruh yang dihasilkan juga positif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Value for Money* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori *Stewardship* yang menjelaskan bahwa aparatur pemerintah sebagai *steward* memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya organisasi secara efektif, efisien, dan ekonomis demi kepentingan masyarakat. Konsep *Value for Money* menekankan pentingnya prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan anggaran sehingga mampu menghasilkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Semakin baik penerapan *Value for Money* maka semakin besar kemungkinan organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan sumber daya yang tersedia..

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan (Amalia et al., 2025) yang menyatakan bahwa *Value for Money* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian (Pradiani et al., 2024) yang menemukan bahwa *Value for Money* tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan karena implementasi prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas belum dilakukan secara optimal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas telah menjadi perhatian penting bagi OPD Kota Palembang dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini diperkuat dengan jawaban responden yang sebagian besar menyatakan setuju bahwa penggunaan anggaran harus dilakukan secara hemat, tepat sasaran, dan mampu menghasilkan manfaat yang optimal bagi organisasi maupun masyarakat. Dengan demikian, semakin baik penerapan *Value for Money* maka akan semakin baik pula pengelolaan keuangan daerah.

Transparansi Anggaran berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai thitung untuk variabel Transparansi Anggaran adalah sebesar 3,161, sedangkan nilai ttabel sebesar 1,986. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai thitung lebih besar daripada ttabel sehingga H_0 ditolak dan H_3 diterima. Nilai signifikansi variabel Transparansi Anggaran yang diperoleh dalam penelitian ini sebesar 0,002, yang berarti lebih kecil dari 0,05 sehingga pengaruh yang dihasilkan signifikan. Berdasarkan hasil koefisien regresi yang bernilai positif, maka pengaruh yang dihasilkan juga positif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Transparansi Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori *Good Governance* yang menjelaskan bahwa transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi terkait pengelolaan keuangan kepada masyarakat secara jelas, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Transparansi yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta memperkuat pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat transparansi yang diterapkan oleh pemerintah daerah, maka semakin baik pula kualitas pengelolaan keuangan yang dihasilkan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan (Pradiani et al., 2024) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Nurhaliza et al. (2025) yang menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja sektor publik. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wonar et al. (2023) yang menemukan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan akibat masih rendahnya tingkat keterbukaan informasi publik di beberapa daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi anggaran merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah pada OPD Kota Palembang. Hal tersebut diperkuat oleh jawaban responden yang sebagian besar menyatakan setuju bahwa informasi mengenai anggaran harus dapat diakses, dipahami, dan diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan adanya keterbukaan informasi tersebut, maka proses pengelolaan keuangan dapat berjalan lebih baik, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip *good governance*.

Akuntabilitas, *Value For Money*, Dan Transparansi Anggaran berpengaruh positif Terhadap Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai *t*-hitung sebesar 30,411, sedangkan nilai *t*-tabel sebesar 2,70. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai *t*-hitung lebih besar daripada *t*-tabel sehingga H_0 ditolak dan H_4 diterima. Nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000, yang berarti lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas, *Value for Money*, dan Transparansi Anggaran secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, melainkan kombinasi dari beberapa faktor yang saling mendukung. Akuntabilitas memastikan adanya pertanggungjawaban penggunaan anggaran. *Value for Money* memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Transparansi Anggaran memastikan adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat dan pihak yang berkepentingan. Ketiga variabel tersebut secara bersama-sama mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,482 menunjukkan bahwa Akuntabilitas, *Value for Money*, dan Transparansi Anggaran mampu menjelaskan Pengelolaan Keuangan sebesar 48,2%, sedangkan sisanya sebesar 51,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Variabel lain tersebut dapat berupa kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan, dan komitmen organisasi. Hasil penelitian ini mendukung konsep Good Governance yang menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Hasil penelitian ini juga mendukung berbagai penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik apabila didukung oleh akuntabilitas yang tinggi, penerapan *Value for Money* yang optimal, dan transparansi anggaran yang memadai. Berdasarkan jawaban responden, sebagian besar responden memberikan penilaian sangat baik terhadap seluruh variabel penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa OPD Kota Palembang telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan penerapan ketiga variabel tersebut agar kualitas pengelolaan keuangan semakin baik. Dengan meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, maka tujuan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai secara lebih optimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh akuntabilitas, *value for money*, dan transparansi anggaran terhadap pengelolaan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Palembang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada OPD di Kota Palembang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan keuangan, maka semakin baik pula pengelolaan keuangan yang dihasilkan.
2. *Value for money* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada OPD di Kota Palembang. Penerapan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan anggaran mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih optimal.
3. Transparansi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada OPD di Kota Palembang. Keterbukaan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
4. Akuntabilitas, *value for money*, dan transparansi anggaran secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada OPD di Kota Palembang. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan dan mempengaruhi

pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, semakin baik penerapan akuntabilitas, value for money, dan transparansi anggaran, maka semakin baik pula pengelolaan keuangan pada OPD di Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Permata, D., Afifudin, & Mawardi, M. C. (2025). (2025). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Konsep Value For Money Terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 2 (01), 306–312.
- Antonius Nababan, R., Sihombing, M., & Thamrin, H. (2022). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan berkonsep value for money. *Jurnal Akuntansi Publik*, 4 (01), 108-120
- Bastian, I. (2019). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Edisi Pertama*. Yogyakarta: BFFE.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16 (1), 49-66
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26. Edisi Sepuluh*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- H. F. I., & R. (2016). Prinsip Transparansi dalam Organisasi. *Jurnal Undiksha*, 2, 306–312.
- Haliah, Sam, A. A. R., & Kusumawati, A. (2024). Disclosure of transparency, accountability and value for money concept in public sector financial management. *International Journal of Public Sector Accounting*. 3 (01), 228-241
- International, T. (2023). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*. 283-303
- Juardi, M. S., Majid, J., & Sayuti, S. (2018). Perwujudan nilai transparansi, akuntabilitas dan konsep value for money dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*. 1 (01), 16-28
- Keuangan, B. P. (2023). Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023.
- Krina, L. L. (2003). Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. *Jakarta: Bappenas*, 1–25.
- L. A. N., & (BPKP), B. P. K. dan P. (2014).. Akuntabilitas Dalam Sektor Publik. *Warta BPK, IV*, 84.
- Mahmudi. (2016). *Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2016). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BFEE.. Edisi Pertama*. Yogyakarta: BFFE.
- Mardiasmo (2018). *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Masdianah, Wonar, K., Siahay, A. Z. D., Pangayow, B. J. C., Salle, H. T., & Bleskadit, N. H. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money Terhadap Pengelolaan Keuangan Sektor Publik. *Jurnal Riset Akuntansi Dan*

Keuangan Daerah., 6, 883–896.

Nurhaliza, S. A., & Yusra, M. (2025). Pengaruh pengawasan keuangan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan terhadap kinerja anggaran berbasis value for money. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik.*, 4 (4), 525–542.

Oktaviani, N. L. P., Zuhroh, S., & Dwirini. (2023). Evaluation of public sector financial performance using value for money. *Journal of Public Sector Accounting.* 2 (01), 57-64

Palembang, B. P. S. K. (2023). Statistik Keuangan Daerah Kota Palembang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (2020).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (2019).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (2010).

Pradiani, T., Yanto, Y., & F. (2024). Analisis Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Anggaran. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah.*, 18 (06), 3871–3892.

Reynowijoyo. (2013). *Konsep Value for Money pada Organisasi Sektor Publik.*

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif.* Alfabeta. Bandung.

Trimarstuti, J. (2019). Transparency and public accountability through public sector accounting. *Journal of Public Sector Accounting.* 1 (01), 30-33

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (2004).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (2008).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (2003).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (2014).

Wonar, K., Masdianah, Siahay, A. Z. D., Pangayow, B. J. C., Salle, H. T., & Bleskadit, N. H. (2023). The effect of transparency, accountability, and value for money on public sector financial management at BPKD Papua Province. *International Journal of Economics and Accounting.* 7 (04), 7508-7516